



## SERAPAN APBD MASIH RENDAH

# *Ini Sejarah Terburuk Riau*

**PEKANBARU (HR)**-Rendahnya penyerapan APBD Riau Tahun 2014, dinilai sebagai sejarah terburuk dalam penyerapan anggaran di Riau sepanjang tahun 2010 hingga 2014.

Menurut peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Triyono, Selasa (4/11), berdasarkan pedoman keuangan yang diatur Permendagri, tutup buku penggunaan keuangan daerah akan berakhir pada 15 Desember 2014. Artinya terhitung saat ini,

...Ini Sejarah Hal 7

### Ini Sejarah...

**HANYA** tinggal sekitar lima minggu penggunaan keuangan daerah.

"Kalau di awal November 2014, sekitar 36,4 persen dan ditargetkan bisa mencapai angka 70 persen hingga tutup buku, berarti pemerintah dalam waktu 5 minggu ini harus bisa merealisasikan penyerapan APBD sekitar 33,6 persen atau sekitar Rp3 triliun dari total APBD Riau sebesar 8,8 triliun," ujarnya.

Hal tersebut, lanjutnya, membuat pihaknya ragu pemerintah mampu merealisasikan target tersebut. Kalaupun diupayakan, tentu pemerintah akan terpaksa menggenjot dengan melakukan proses lelang dan sebagainya. "Hal itulah yang membuat kita ragu akan efektivitas dan kualitas pekerjaannya," lanjutnya.

Dengan demikian, sebutnya, setidaknya pemerintah hanya mampu melakukan kegiatan pembangunan yang sifatnya tidak menggunakan waktu lama. Atau melakukan pembayaran belanja-belanja rutin seperti belanja rutin kesehatan, pendidikan, pegawai, operasional pegawai, dana Bansos dan hibah.

"Sementara belanja modal terkait program penurunan angka kemiskinan, perbaikan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan program fisik seperti membuka akses jalan dan sebagainya, kita pesimis terealisasi," terangnya.

Namun demikian, pihaknya berharap apabila Pemprov Riau berupaya mengejar target hingga tutup buku di tahun 2014 ini, setidaknya Pemprov Riau harus menggesa pelaksanaan yang bersinggungan dengan pelayanan publik. "Jangan sampai, gara-gara minimnya penyerapan anggaran, kegiatan pelayanan publik terbengkalai," tukasnya.

Sementara itu, Triyono memprediksikan akibat rendahnya penyerapan anggaran di tahun 2014 ini, akan meningkatkan belanja daerah di tahun 2015. Yang silpa di tahun 2014 akan semakin besar. "Atau bagi pemerintah, karena banyaknya uangnya tidak terpakai di tahun ini, mereka memikirkan untuk memnginvestasikan ke kepada BUMD. Bisa saja ini menjadi akal-akalan mereka," pungkasnya.

Sedangkan Direktur Riau Corruption Watch (RCW),

Mayandri Suzarman, rendahnya serapan APBD Riau tahun 2014 menandakan lemahnya kinerja masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ada. "Oleh karenanya kita minta agar SKPD-SKPD yang tidak mencapai target segera dievaluasi," ujarnya.

Pihaknya juga khawatir dengan waktu sekitar 5 minggu ini, banyak proyek-proyek yang dipaksakan. Yang tentunya hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu, pihaknya juga mendorong agar proyek-proyek yang belum dilaksanakan atau yang saat ini tengah dikerjakan namun belum selesai, jangan sampai mengurangi mutu pengerjaan.

#### 70 Persen Batal

Salah satu dinas yang serapannya kecil adalah Dinas Bina Marga Riau. Dari 207 kegiatan senilai Rp900 miliar yang ada di dinas ini, yang bisa direalisasikan baru 70 kegiatan. Kondisi itu diakui Kadis Bina Marga Riau Safril Buchari.

"Ini tidak mungkin lagi kita kejar karena waktu juga tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan, jadi terpaksa kita batalkan," akunya.

Hingga akhir Oktober lalu, diakui Syafril, serapan APBD di Dinas Bina marga Riau masih sekitar 5 persen dari Rp900 miliar anggaran yang tersedia di instansi tersebut. Selain itu, saat ini pihaknya masih mengadakan perbaikan perubahan dari Dinas Pekerjaan umum (PU) ke Dinas Bina Marga yang dipecah menjadi dua instansi itu dan mengajukan 33 Surat Perintah Membayar (SPM).

"Dengan demikian, dalam waktu dua bulan ini kita berusaha untuk mendorong realisasi APBD Riau di Dinas Bina Marga sekitar 53 persen hingga akhir tahun ini," ujarnya.

Dijelaskannya anggaran yang ada di Dinas Bina Marga tersebut sekitar Rp900 milyar untuk anggaran fisik dan biaya tidak langsung. Sebab, untuk pengerjaan fisik diakuinya masih bisa dikejar hingga 53 persen. Banyak lelang proyek yang tidak bisa dijalankan dengan waktu yang hanya menyisakan satu bulan lagi.

"Kita doakan bersama, mudah-mudahan pada rapat evaluasi berikutnya realisasi kita sudah ada perubahan," tukasnya. (dod, nur)

Dari Hal. 1